Authentic Research of Global Fisheries Application Journal
(Aurelia Journal)
E-ISSN 2715-7113
E-mail: aureliajournal.pkpd@gmail.com

PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN MARIKULTUR DI TELUK AMBON MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KETERLIBATAN PEMUDA

UTILIZATION OF MARICULTURE FISHERY RESOURCES IN AMBON BAY THROUGH GOVERNMENT POLICIES AND YOUTH INVOLVEMENT

Ongen Rumaryo Lekirupy[1*], Sri Panca Rahayu[2]
[1]Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Jalan Langgur – Sathean Km 6 Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia
[2]Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Lingga, Jalan Pelabuhan Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep,Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
[*]Korespondensi: ongenhooyaa@gmail.com (OR Lekirupy)
Diterima 28 Februari 2025 – Disetujui 21 April 2025

ABSTRAK. Tantangan pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di Teluk Ambon, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya akses pasar, serta kebijakan pemerintah yang belum optimal. Pemerintah Kota Ambon dan provinsi Maluku telah menetapkan kawasan tersebut untuk pengembangan budidaya laut. Keterlibatan pemuda menjadi aspek penting karena pemuda sebagai mitra dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk keterlibatan pemuda, kebijakan pemerintah, dan bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di Teluk Ambon. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap 51 responden. Bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur yang teridentifikasi adalah budidaya rumput laut dan budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung. Bentuk keterlibatan pemuda yaitu 5,9% sebagai pelaku usaha, 68,6% sebagai anggota kelompok usaha, dan 25,5% sebagai tenaga kerja. Intervensi kebijkan pemerintah di lokasi tersebut berupa pemberian bantuan/hibah benih ikan, pakan, sarana penunjang, dan pelatihan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, serta pemerintah desa/kelurahan selalu memberikan bantuan/hibah berupa sarana penunjang produksi untuk budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung. Kebijakan Pemerintah mengenai pemberdayaan khususnya bagi pemuda perlu dilakukan secara konprehensif mulai dari mempersiapkan sumberdaya manusia (pemuda), kompetensi dan keterampilan yang memadai serta didukung dengan akses modal usaha yang mudah diakses sebagai upaya mendorong keterlibatan pemuda dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan marikultur di Teluk Ambon.

KATA KUNCI : Pemanfaatan, perikanan marikultur, kebijakan pemerintah, keterlibatan pemuda.

ABSTRAC. *The utilization of mariculture fisheries resources in Ambon Bay faces several challenges, including technological limitations, limited market access, and suboptimal government policies. The Ambon City Government and the Maluku Provincial Government have designated this area for marine aquaculture development. Youth involvement is a crucial aspect, as young people serve as partners in the implementation of government policies. This study aims to identify the forms of youth involvement, government policies, and the utilization practices of mariculture fisheries resources in Ambon Bay. Data collection was conducted through interviews with 51 respondents. The identified forms of mariculture fisheries resource utilization include seaweed farming and fish cultivation using floating net cage systems. Youth involvement was categorized as follows: 5.9% as business owners, 68.6% as members of business groups, and 25.5% as laborers. Government policy interventions in the area include the provision of assistance or grants in the form of fish seed, feed, supporting facilities, and training by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Maluku Provincial Government, the Ambon City Government, as well as village and sub-district governments. These entities consistently provide support in the form of production facilities for fish farming using floating net cage systems. Government policies on youth empowerment need to be implemented comprehensively, beginning with the preparation of human resources (youth), the development of adequate competencies and skills, and the provision of accessible business capital. These efforts aim to encourage greater youth involvement in the utilization of mariculture fisheries resources in Ambon Bay.*

KEYWORDS: *Utilization, mariculture fisheries, government policy, youth involvement.*

DOI:10.15578/aj.v7i1.15338

1. Pendahulan

Perikanan marikultur memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir, termasuk di Teluk Ambon. Kawasan perairan Teluk Ambon sangat berpotensi untuk pengembangan marikultur karena kaya akan sumberdaya hayati, memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan kondisi perairannya cukup tenang (Syahrir *et al*., 2020). Akan tetapi pada kenyataanya pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di Teluk Ambon diperhadapkan dengan tantangan keterbatasan teknologi, minimnya akses pasar, serta ketidak optimalan dari kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor tersebut (Rahman *et al.,* 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat terlebih khusus yang tergolong sebagai pemuda dengan usia produktif dalam pembangunan sektor perikanan di lokasi tersebut juga perlu ditingkatkan.

Pemerintah Kota Ambon di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 menetapkan Teluk Ambon sebagai kawasan pengembangan budidaya laut (Bappekot, 2011). Selain itu berdasarkan potensi wilayah tersebut, dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku tahun 2018, kawasan Teluk Ambon juga ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan budiaya. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah turut serta mengupayakan pengembangan perikanan Marikultur di kawasan tersebut. Kebijakan dari pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan marikultur. Akan tetapi, untuk mendukung suatu kebijakan pemerintah maka sangat diperlukan keterlibatan masyarakat terkhususnya para nelayan yang menjadikan sektor perikanan sebagai sumber perekonomian. Penerapan regulasi yang tepat, dapat memberi ruang terhadap pemanfaatan potensi perikanan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhususnya para nelayan dan pelaku usaha budidaya ikan (Kurniawan & Hidayat, 2019).

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan dan pengembangan sektor perikanan marikultur menjadi aspek penting untuk keberlanjutan industri perikanan. Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi dan teknologi, pengelolaan usaha, dan pemasaran produk perikanan berbasis digital (Putri & Rahayu, 2020). Saat ini, keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan, jangkauan modal usaha, dan minimnya sosialisasi mengenai peluang bisnis di sektor perikanan (Wicaksono *et al*., 2022). Dalam penelitian (Rahayu *et al.,* 2023) yang dilakukan di lokasi perairan Teluk Ambon dengan kajian tentang perspektif pemuda terhadap usaha budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Apung di Kota Ambon, merekomendasikan bahwa peran pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam memberdayakan pemuda harus didukung dengan kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemuda agar dapat terlibat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan marikultur yang ada di kawasan perairan Teluk Ambon. Kebijakan tersebut berupa sosialisasi, motivasi, dan pelatihan terpadu yang ditujukan kepada para pemuda. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara masyarakat terkhususnya pemuda dengan kebijakan pemerintah yang kolaboratif agar dapat mendorong partisipasi pemuda untuk terlibat secara aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di Teluk Ambon.

Berdasarkan konteks dan pemasalahan baik potensi sumberdaya perikanan marikultur, keterlibatan pemuda bahkan intervensi kebijakan oleh pemerintah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini digagas dengan tujuan untuk mengidentifikasi bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur, bentuk peran pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur, serta bentuk intervensi kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan sumerdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah kawasan pesisisr perairan Teluk Ambon yang difokuskan pada lokasi pengembangan budidaya laut seperti Keramba Jaring Apung maupun budidaya rumput laut. Lokasi tersebut dipilih karena melalui kebijakan pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan budidaya laut, sehingga dianggap relevan dalam menjawab tujuan dari penelitian ini. Sasaran penelitian ini adalah para pemuda yang memanfaatkan sumberdaya perikanan Marikultur seperti budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung maupun budidaya Rumput Laut di kawasan perairan Teluk Ambon. Secara administratif, perairan Teluk Ambon terletak di wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku, tepatnya di pulau Ambon. Teluk Ambon terbentang dari bagian timur hingga ke bagian barat pulau Ambon, dengan mulut teluk yang berhadapan langsung dengan perairan Laut Banda di sebelah barat daya. Pelaksanaan penelitian dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Qgis, 2025

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Jenis dan Metode Pengambilan Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer menggunakan metode wawancara terhadap responden pemuda sebanyak 51 orang pemuda. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan mengacu pada kriteria usia sesuai Undang-undang Repubkik Iindonesia No.40/2009 yaitu, 16 sampai 30 tahun. Para pemuda yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur, baik sebagai pelaku usaha budidaya, anggota kelompok usaha budidaya maupun tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha budidya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur sedangkan data sekunder diperoleh melalui informasi publik berupa hasil penelitian, publikasi jurnal maupun data rilis dari instansi-instansi terkait.

2.3. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara akan ditabulasi dan dianalisa secara kauntitatif dan ditampilkan dalam bentuk tabel serta dilanjutkan dengan interpretasi secara deskriptif. Untuk data sekunder hanya dideskriptifkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Marikultur

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan Teluk Ambon berdasarkan hasil penelitian ini adalah pembangunan dan pengembangan berupa budidaya rumput laut dan budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung dengan aktivitas pada umumnya melakukan kegiatan pembesaran ikan. Konstruksi Keramba Jaring Apung yang ada di kawasan tersebut terdiri dari konstruksi kayu dan aquatech. Untuk budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung di Teluk Ambon pada umumnya meliputi pembesaran berbagai jenis ikan yakni; ikan Bubara, ikan Kakap merah dan Putih, ikan Kerapu, ikan Lema dan ikan hias. Aktivitas pembesaran ikan pada Keramba Jaring Apung tersebut rata-rata memperoleh benih ikan dari Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon baik dibeli maupun diberikan dalam bentuk hibah atau bantuah kepada para nelayan budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung di Teluk Ambon. Selain Membeli ataupun menerima dalam bentuk hibah/bantuan, para nelayan juga melakukan restoking benih ikan dari hasil tangkapan sendiri maupun membeli dari hasil tangkapan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan tangkap.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur menjadi solusi kongkrit yang dapat meminimalisir tekanan terhadap kegiatan perikanan tangkap serta mendukung ketahanan pangan nasional (KKP, 2022). Pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon terkhususnya budidaya perikanan dengan sitem Keramba Jaring Apung diharapakan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar di daerah maupun untuk tujuan ekspor. Adapun sebaran pemanfatan sumberdaya dan pengembangan sektor perikanan marikultur khususnya budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung berdasarkan Desa, Kelurahan, dan Negeri di Teluk Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Lokasi dan Kepemilikan Keramba Jaring Apung di Teluk Ambon.

Lokasi KJA (perairan)	Kepemilikan KJA		Jumlah Unit	Persentase (%)
	Instansi (unit)	Masyarakat (unit)		
Negeri Rumahtiga	-	2	2	3,1
Desa Poka	1	10	11	17,2
Desa Hunut	-	1	1	1,6
Desa Waiheru	2	26	28	43,7
Desa Negeri Lama	-	5	5	7,8
Negeri Hative Kecil	1	1	2	3,1
Kelurahan Lateri	-	4	4	6,3
Desa Latta	-	6	6	9,4
Negeri Halong	1	2	3	4,7
Kelurahan Wainitu	-	2	2	3,1
Jumlah	**5**	**59**	**64**	**100 %**

Untuk budidaya rumput laut di kawasan perairan Teluk Ambon, lokasinya berpusat pada kawasan perairan desa Waiheru. Akan tetapi untuk aktivitas produksi budidaya rumput laut di kawasan tersebut tidak selalu berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu. Jika pada musim hujan dan curah hujan menjadi tinggi maka akan berpengaruh pada produktifitas rumput laut yang dibudidayakan. Hal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi dapat menyuplai pasokan air tawar dan sedimen lain melalui beberpa aliran sungai yang terhubung langsung dengan perairan Teluk Ambon sehingga turut mempengaruhi produktifitas

rumput laut. Musim tanam rumput laut yang produktif umumnya dilakukan pada rentang waktu dengan curah hujan yang cenderung rendah hingga kemarau dengan suhu udara yang lebih rendah antara 24 ºc hingga 27ºc, (Aslan, *et al*., 2020).

Data pada tabel di atas juga menunjukan bahwa terdapat 64 unit usaha budidya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung yang ada di kawasan perairan Teluk Ambon. Dari total jumlah tersebut 59 unit diantaranya adalah milik para nelayan atau pelaku usaha budidaya sedangkan 5 unit lainnya merupakan miik instansi/pemerintah. Dari total 64 unit Keramba Jaring Apung dan sebarannya pada lokasi perairan Teluk Ambon sangat didominasi perairan pesisir desa Waiheru dengan jumlah sebanyak 28 unit Keramba Jaring Apung atau setara 43,7%, desa Poka sebanyak 11 unit atau setara 17,2%, desa Latta sebanyak 6 unit atau setara 9,4%, desa Negeri Lama 5 unit atau setara 7,8%, kelurahan Lateri sebanyak 4 unit atau setara 6,3%, negeri Halong sebanyak 3 unit atau setara 4,7%, negeri Rumahtiga dan kelurahan Wainitu masing-masing 2 unit atau setara 3,1% sedangkan desa Hunut hanya terdapat 1 unit atau setara 1,6%. Perairan desa Waiheru sangat mendominasi kegiatan budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung karena kawasan ini memilki kondisi perairan yang terlindung dari gelombang besar dan relatif tenang, (Pattikawa dan Lestari, (2021).

3.2. Bentuk Keterlibatan Pemuda dalam Memanfaatkan Sumberdaya Perikanan Marikultur.

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh, bentuk-bentuk keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon teridentifikasi ada 3 bentuk peran pemuda yaitu pemuda terlibat sebagai pelaku/pemilik usaha, anggota kelompok usaha dan pemuda terlibat sebagai tenaga kerja atau dipekerjakan. Bentuk-bentuk keterlibatan pemuda dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 2. Bentuk Keterlibatan Pemuda dalam Pemanfaatan Sumberdaya.

Bentuk Keterlibatan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pemilik Usaha KJA	3	5,9
Anggota Kelompok Usaha KJA	35	68,6
Tenaga Kerja	13	25,5
Jumlah	**51**	**100 %**

Data pada tabel tersebut menunjukan bahwa terdapat 51 orang pemuda dengan kriteria usia antara 16 sampai 30 tahun sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.40/2009, yang terlibat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon. Dari 51 orang pemuda tersebut, 17,6% atau 9 orang berusia antara 16 sampai 20 tahun, 56,9% atau 29 orang berusia antara 21 sampai 25 tahun sedangkan 25,5% atau 13 orang berusia antara 26 sampai 30 tahun. Dari data pada tabel tersebut teridentifikasi bahwa, terdapat 3 bentuk keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur antara lain adalah pemuda yang terlibat sebagai pemilik/pelaku usaha budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 3 orang atau setara 5,9%, pemuda yang terlibat sebagai anggota kelompok usaha budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung sebanyak 35 orang atau setara dengan 68,6%, dan pemuda yang terlibat sebagai tenaga kerja atau dipekerjakan pada usaha budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung adalah sebanyak 13 orang atau setara 25,5%. Data ini menunjukan bahwa keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan maikultur di kawasan perairan Teluk Ambon sangat didominasi oleh pemuda yang yang hanya terlibat sebagai anggota kelompok usaha. Keterlibatan pemuda dalam dunia usaha perikanan budidaya masih sangat minim karena belum banyak pemuda yang berperan sebagai manajer atau pemilik usaha, (Sahuleka *et al.,* 2020).

Data pada tabel juga menunjukan bahwa pemuda yang terlibat sebagai pemilik atau pelaku usaha masih sangat minim yaitu sebanyak 5,9%. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan pemuda secara langsung dengan berbagai konsekuensi dan resikonya sebagai pelaku usaha dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan marikultur khususnya budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung masih sangat minim, karena keterlibatan pemuda masih didominasi sebagai anggota kelompok usaha dan sebagai tenaga kerja. Keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur terhambat oleh minimnya akses modal usaha dan kurangnya ketrampilan teknis budidaya (LIPI, 2020). Hal ini terkonfirmasi dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa 94,1% pemuda hanya terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur sebagai anggota kelompok usaha dan tenaga kerja pada usaha buididaya Keramba Jaring Apung. Berkaitan dengan keterlibatan pemuda tersebut, (Rahayu *et al.,* 2023) merekomendasikan bahwa peran lembaga terkait dalam pemberdayaan pemuda harus memberikan sosialisasi, motivasi, pelatihan dalam meningkatkan keterampilan para pemuda agar pemuda dapat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang ada di kawasan perairan Teluk Ambon.

3.3. Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Marikultur

Intervensi kebijakan pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah berdasarkan tingkatan keenangannya masing-masing turut memberi dampak bagi pengelolaan sumberdaya perikanan di indonesia. Kebijakan pemerintah sangat berperan penting dalam mendukung pengembangan Marikultur yang berkelanjutan di perairan indonesia (Sutrisno & Lestari, 2021). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa bentuk intervensi atau kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bahkan pemerintah desa atau negeri dan kelurahan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur yang dilakukan dengan fukus lokasi di kawasan perairan Teluk Ambon termasuk sangat komprehensif karena intervensi kebijakannya berasal dari pemerintah tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Ambon, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Ambon, serta Pemerintah Desa, Negeri, Maupun Kelurahan yang ada sekitar Kawasan Teluk Ambon. Adapun bentuk-bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon secara periodik dan berkesinambungan memberikan atau memfasilitasi kegiatan penyuluhan atau pelatihan bagi masyarakat dalam terkhususnya para nelayan/pelaku usaha budiaya dengan sistem Keramba Jaring Apung sebagai upaya atau langkah pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan Marikultur secara berkelanjutan di kawasan perairan Teluk Ambon.
2. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon secara periodik memberikan bantuan atau hibah kepada masyarakat dalam hal ini para nelayan budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung, berupa benih ikan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di kawasan perairan Teluk Ambon serta mempertahankan keberlanjutan usaha perikanan budidaya bagi para nelayan atau pelaku usaha budidya tersebut.
3. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Melalui program pemberdayaan nelayan yang secara periodik dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan usaha budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung di kawasan perairan

Teluk Ambon dengan memberikan bantuan atau hibah dalam bentuk sarana penunjang kegiatan produksi berupa Aquatech, mesin pemotong pakan, benih, pakan dan Freezer untuk menyimpan pakan ikan.

4. Pemerintah Kota melalui Dinas Perikanan Kota Ambon, Dinas Perikanan Kota dengan program pemberdayaan nelayan khususnya pengembangan usaha perikanan budidaya dengan sitem Keramba Jaring Apung di kawasan perairan Teluk Ambon secara periodik memberikan bantuan atau hibah fasilitas penunjang produksi seperti Keramba Jaring Apung (Aquatech), perahu, spit, benih, pakan, dan Freezer untuk sarana penyimpan pakan ikan.
5. Pemerintah Desa/Negeri, Desa atau Negeri yang berada di wilayah penelitian ini mengalokasikan Anggran Dana Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMNEG) maupun kepada warga desa atau negeri setempat yang membangun kelompok usaha perikanan budaya dengan sistem Keramba Jaring Apung di kawasan perairan Teluk Ambon. Kebijakan ini dilakukan dengan sistem bantuan atau hibah berupa fasilitas penunjang produksi seperti unit Keramba Jaring Apung (konstruksi kayu), perahu, dan benih.

Hasil identifikasi bentuk-bentuk keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon masih sangat minim, terkhususnya pemuda terlibat sebagai pelaku usaha atau pemilik usaha budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung. Daya intervensi kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan yang begitu komprehensif baik dari tingkat pusat hinga ke daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat banyak sekali bentuk intervensi kebijakan pemerintah baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, bahkan hingga pemerintah desa dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur di kawasan perairan Teluk Ambon. Bentuk-bentuk intervensi kebijakan yang telah dilakukan dan difokuskan di kawasan perairan Teluk Ambon ini selaras dengan BRIN (2023), yang menyatakan bahwa pemerintah selalu menerapkan pengembangan kebijakan insentif bagi para pelaku usaha muda yang bergerak di sektor perikanan marikultur antara lain subsidi benih, bantuan teknologi *smart aquakulture,* serta pendanaan atau akses terhadap modal usaha berbasis kredit usaha rakyat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lokasi perairan Teluk Ambon yang dianalisis dan dibahas maka dapat disimpulkan bahwa; 1) Bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur yang yang ada di kawasan tersebut adalah berupa budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung dan budidaya rumput laut; 2) Keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur adalah sebagai pelaku/pemilik usaha sebanyak 5,9%, sebagai anggota kelompok usaha sebanyak 68,6%, dan sebagai tenaga kerja pada usaha budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung sebanyak 25,5%; dan 3) Bentuk intervensi kebijakan pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kota, bahkan desa selalu memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan marikultur khususnya budidaya dengan sitem Keramba Jaring Apung serta memberikan bantun/hibah berupa sarana penunjang produksi seperti, unit KJA, mesin pemotong pakan, spitbot/perahu, benih, pakan, dan freezer (penyimpan pakan). Keterlibatan pemuda sebagai pelaku usaha masih sangat minim sehingga dapat direkomendasikan bahwa kebijakan Pemerintah mengenai pemberdayaan khususnya bagi pemuda perlu dilakukan secara konprehensif mulai dari mempersiapkan sumberdaya manusia (pemuda), kompetensi dan keterampilan yang memadai serta didukung dengan akses modal usaha yang mudah diakses sebagai upaya mempersiapkan para pemuda untuk mengambil peran dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan marikultur yang ada di kawasan perairan Teluk Ambon.

Daftar Pustaka

Aslan, L. M., Amir, F., & Rachmansyah, (2020). Pengaruh Iklim Terhadap Musim Tanam Rumput Laut di Teluk Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Riset Akuakultur*, 15(2), 123-134.

BAPPEDA [Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah] Kota Ambon, (2011). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon tahun 2011-2031. Pemerintah Kota Ambon.

BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] Republik Indonesia, (2023). Insentif dan Dukungan Teknologi Bagi Pemuda dalam Sektor Perikanan Marikultur. *Jurnal Inovasi Perikanan dan Kelautan*, 16(2), 88-91.

KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan] Republik Indonesia, (2022). Strategi Pengembangan Marikultur Berkelanjutan di Indonesia. (45-46). Jakarta: KKKP.

Kurniawan, A., & Hidayat, R. (2019). Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan,* 14(2), 87-98.

LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia], (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pemuda dalam Sektor Perikanan Marikultur. *Jurnal Pengembangan Sumberdaya Perikanan*, 10(3), 112-115.

Pattikawa, J. A., & Lestari, M. W., (2021). Pengaruh Lingkungan Perairan Terhadap Budidaya Ikan di Keramba Jaring Apung di Perairan Teluk Ambon Dalam, Maluku. *Papalele: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan,* 15(1), 45-56.

PERDA [Peraturan Daerah] Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2018. Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku.

Putri, M., & Rahayu, D. (2020). Peran Pemuda dalam Inovasi Teknologi Perikanan Budidaya. *Jurnal Pengembangan Sumberdaya Pesisir,* 8(1), 45-57.

Rahayu, S. P., Mosse, J. W., Apituley, Y. M. T. N. (2023). Perspektif Pemuda Terhadap Usaha Budidaya Ikan Kerapu (*Epinephelus* sp.) di Kota Ambon. *Papalele: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan,* 7(2), 113-120.

Rahman, T., Yusuf, M., & Santoso, B. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Marikultur di Wilayah Pesisir Indonesia. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 6(1), 32-47.

Sahuleka, M., Apituley, Y. M. T. N., & Bawole, D. (2020). Strategi Pelibatan Pemuda dalam Pengembangan Usaha Budidaya Keramba Jaring Apung di Teluk Ambon Dalam. *Papalele: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan,* 4(2), 45-57.

Sutrisno, B. & Lestari, R. (2021). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Marikultur Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Indonesia. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, 18(1), 103-112

Syahrir, I., Nugroho, A., & Lestari, P. (2020). Potensi dan Tantangan Marikultur di Perairan Indonesia: Studi Kasus Teluk Ambon. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 12(3), 120-135.

Undang-undang Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 40 tahun 2009. Tentang Kepemudaan. Pemerintah Republik Indonesia.

Wicaksono, R., Setiawan, D., & Arifin, A. (2022). Pemberdayaan Pemuda dalam Pengembangan Ekonomi Marikultur. *Jurnal Ekonomi Pesisir*, 10(2), 66-78.